

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anies Pertimbangkan Libatkan Swasta untuk Biayai Proyek MRT

Anies menargetkan panjang rel kereta MRT mencapai 223 kilometer pada 2023.

Inge Klara Safitri

inge.klara@tempo.co.id

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berniat mengandalkan pendanaan swasta untuk melanjutkan proyek moda raya terpadu (MRT) dan *light rail transit* (LRT). Opsi itu tengah didiskusikan bersama berbagai pihak terkait.

“Memang dari awal kita tidak berencana itu untuk APBD atau APBN saja,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin. “Setelah *fix* semua, baru nanti kita akan umumkan.”

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyarankan agar biaya perpanjangan rel kereta MRT dan LRT menggunakan skema kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema itu menuntut kerja sama pembiayaan dengan swasta atau badan usaha lain. Dengan demikian, ujar Bambang, pelaksanaan proyek tak sepenuhnya bergantung pada anggaran nasional

dan daerah.

“Semangat Pak Gubernur adalah bagaimana memobilisasi investasi tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari swasta,” ujar Bambang, kemarin. Bahkan skema itu bisa diterapkan untuk delapan pembiayaan infrastruktur publik Jakarta 2030. Beberapa di antaranya adalah pengembangan panjang rute Transjakarta serta pembangunan jaringan rel *elevated loop line*.

Anies telah mengajukan proposal target dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur publik Jakarta 2030 kepada pemerintah pusat. Ada 9 proyek yang dicantumkan, salah satunya adalah perpanjangan rel kereta MRT hingga 223 kilometer dengan total anggaran Rp 214 triliun.

Jumlah itu disampaikan Bambang dalam paparannya di sidang pleno Musrenbang DKI 2019. Bambang menyebutkan, angka tersebut mencakup pembangunan secara keseluruhan, dari pendirian infrastruktur hingga

penyediaan kereta MRT. “Iya, tentunya itu pembangunan yang lengkap, sampai MRT siap dipakai,” kata Bambang.

Selain itu, Bambang menambahkan, Gubernur Anies menargetkan perpanjangan rel LRT hingga 2030 mencapai 116 kilometer dengan anggaran Rp 60 triliun. “LRT juga keseluruhan semua,” katanya. Selanjutnya ada penyediaan permukiman hingga 600 ribu unit, peningkatan cakupan air bersih ke 100 persen warga DKI, peningkatan cakupan jaringan air limbah hingga 81 persen penduduk DKI, serta pengendalian banjir dan penambahan pasokan air.

Anies juga mengusulkan program penghapusan lintasan sebidang. Dengan program ini, Anies berencana membuat seluruh jalur kereta menjadi melayang. Dengan begitu, nanti tidak ada lagi perpotongan antara jalan dan rel yang kerap menimbulkan kemacetan.

Bambang telah mengkaji rencana pembiayaan

kesembilan proyek yang diusulkan Anies. Atas dasar itulah ia menyarankan untuk menggunakan skema pembiayaan yang melibatkan swasta.

“Pembiayaan dari APBD atau APBN murni hanya revitalisasi angkutan perkotaan,” ujarnya.

Adapun saat ini MRT fase I baru melayani rute Lebak Bulus sampai Bundaran HI sepanjang 15,7 kilometer. Sedangkan kereta LRT hanya meluncur dari Kelapa Gading-Velodrome dengan panjang rel 6 kilometer. Sementara itu, pembangunan LRT fase II tengah berjalan.

● LANI DIANA

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anies Pertimbangkan Libatkan Swasta untuk Biayai Proyek MRT

Proyek Infrastruktur yang Didanai Swasta

SEJUALAH proyek infrastruktur besar di Jakarta dibangun menggunakan dana swasta melalui mekanisme *corporate social responsibility* (CSR) dan koefisien lantai bangunan (KLB). Pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, mekanisme itu dimanfaatkan untuk mendanai banyak proyek, di antaranya rumah susun Jalan Daan Mogot, rumah susun Muara Baru, dan Simpang Susun Semanggi.

Meski tidak menolak mekanisme pendanaan dari swasta itu, Gubernur DKI Anies Baswedan sempat melontarkan kritik terhadap pendahulunya, terutama soal pembangunan Simpang Susun Semanggi. Menurut Anies, pembangunan infrastruktur seperti itu harus direncanakan dengan baik, sehingga bisa dibiayai oleh negara melalui APBD atau APBN.

Berikut ini proyek infrastruktur pada masa pemerintahan Anies Baswedan yang memanfaatkan pendanaan dari swasta:

1. Jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Sudirman (KLB PT Permadani Khatulistiwa Nusantara) dengan total anggaran Rp 56,2 miliar.
 - JPO Polda Metro Jaya: Rp 19,3 miliar.
 - JPO Gelora Bung Karno: Rp 18,5 miliar.
 - JPO Bundaran Senayan: Rp 17,4 miliar.
 - Jasa konsultan: Rp 1 miliar.
2. JPO Pasar Minggu (KLB PT Permadani Khatulistiwa Nusantara) dengan total anggaran Rp 6 miliar.
Mulai dibangun April 2019.
3. JPO Daan Mogot dengan total anggaran Rp 5-7 miliar (perkiraan).
Rencana dibangun Mei 2019.